



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI

KE PELABUHAN MERAK, PROVINSI BANTEN

PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022

TANGGAL 23 - 25 SEPTEMBER 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PELABUHAN MERAK DI PROVINSI BANTEN
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 23 - 25 SEPTEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Pasal 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI (Tata Tertib DPR RI) mengatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sebagaimana dalam Pasal 98 Undang-Undang MD3 dan Pasal 59 Tata Tertib DPR RI mengatur bahwa Komisi mempunyai tugas dalam 3 (tiga) bidang, yaitu pembentukan undang-undang, anggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan, Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja. Menindaklanjuti aturan tersebut, Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Intern untuk memutuskan Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Pelabuhan Merak Provinsi Banten sebagai tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, pelabuhan Merak Provinsi Banten sebagaimana mandat PP

No. 7 Tahun 2021 yakni *Pilot Project* dalam penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil menengah.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari pihak terkait yang berhubungan dengan implementasi PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UKM termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara khusus, bertujuan untuk mengetahui sosialisasi PP tersebut kepada berbagai pihak agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP tersebut apakah dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Merak sebagai BUMN pengelola Pelabuhan Merak yang menjadi lokasi *Pilot Project* mandat PP No. 7 Tahun 2021 dalam penyediaan tempat promosi dan pengembangan UKM.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunjuran Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-189	ARIA BIMA	PIMP.F.PDIP
2	A-199	MUHAMMAD PRAKOSA	F.PDIP
3	A-232	I NYOMAN PARTA	F.PDIP
4	A-229	ST. ANANTA WAHANA, SH, MH	F.PDIP
5	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
6	A-128	Dr. SUPRATMAN AANDI AGTAS, SH, MH	F.GERINDRA
7	A-19	MARWAN JA'FAR	F.PKB
8	A-572	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	F.PD
9	A-409	RAFLI	F.PKS

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Komisi VI DPR RI meninjau implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Peninjauan dilakukan dengan mengunjungi pelabuhan Merak Banten. Dalam kunjungan tersebut Komisi VI DPR RI menyoroti implementasi dari aspek pemberian ruang di infrastruktur publik untuk mendukung pengembangan dan promosi UMKM yang ditetapkan minimal 30 %.

Komisi VI mengapresiasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau yang biasa disingkat dengan ASDP di Merak, telah mengalokasikan tempat yang dialokasikan untuk UMK. Dari data yang ada sudah mencapai **58%** untuk alokasi di area UMKM, *tenannya* sebanyak 23 dengan ruang rata-2 ukuran 2x3.

Komisi VI mendorong implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 khusus di infrastruktur publik di pelabuhan Merak dapat lebih dioptimalkan dengan cara kolaborasi kemitraan antar pelaku usaha mikro, kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, serta ada pendampingan bagi usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha yang menengah dan yang besar serta pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mengangkat skala usaha mikro dan kecil.

Komisi VI meminta Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan BUMN terkait terus berupaya memajukan produk-produknya UMKM agar digemari oleh konsumen. Untuk mewujudkan hal ini, tentu perlu adanya bimbingan dan pelatihan seperti pelatihan *vocational* dan juga perlu ada pendampingan. Komisi VI meminta Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah menyiapkan bimbingan dalam bentuk pelatihan, serta memaksimalkan peran PLUT untuk melakukan pendampingan.

Dalam kunjungan tersebut Komisi VI DPR RI melihat UMKM yang ada di pelabuhan Merak belum membentuk koperasi. Untuk itu pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai pengelola Pelabuhan Merak supaya memfasilitasi para pelaku usaha menjadi anggota koperasi atau membentuk koperasi.

Dari penjelasan dan diskusi pada saat kunjungan kerja spesifik dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati, Kementerian Koperasi dan UMKM yang diwakili Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto dan dari Kementerian BUMN yang

diwakili oleh Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Desty Arlaini, diketahui bahwa;

1. ASDP akan menjadikan pelabuhan penyeberangan menjadi terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar UMKM yang terintergrasi juga dengan tujuan wisata.
2. Rencana tersebut telah dipaparkan diidepan Anggota Komisi VI DPR RI sebagai 3 pilar ASDP yaitu;
 - a. Fokus pada konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan
 - b. Fokus pada peningkatan dan pengembangan konektivitas pasar baik pada rute komersial (30%) maupun perintis (70%).
 - c. Fokus untuk masuk menjadi player di sektor Pariwisata ditandai dengan kawasan Marina yang ada di Labuan Bajo dan juga kawasan di Batang yang akan segera dibangun.
3. Saat ini profil *tenant* Pelabuhan Merak 23 merupakan *tenant* UMKM dan 34 *tenant* merupakan *tenant* perkantoran. Pelabuhan Merak telah menyediakan area komersial khusus untuk UMKM seluas 4.136 M2, sementara untuk area komersil lainnya (perkantoran) seluas 7.036M2.

4. Data penggunaan infrastruktur publik oleh UMKM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Infrastruktur Publik	Alamat	Luas (M2)	Luas Area utk UMKM	Bentuk kerjasama dg UMKM	Jumlah UMKM		Jenis Produk	Ratio
						Kelas	Jumlah		
1.	Terminal Reguler Merak,	Merak Tamansai, Kota Cilegon banten	2887	882,41	Sewa	Mikro Kecil	16 3	Toko, Makanan, kantin	36%
2.	Terminal Terpadu Merak	Merak, Tamansari, Kec.Pulomerak, Kota cilegon Banten	1245	600	Sewa	Mikro	4	Toko, Makanan, kantin	
3.	Pelabuhan Ketapang	Jl. Gatot Subroto Ketapang, Banyuwangi	19446	5932,06	Sewa	Mikro Kecil	12 19	Toko, Makanan, kantin	31%
4.	Pelabuhan Gilimanuk	Jl.Raya Pelabuhan Gilimanuk	550	253,77	Sewa	Mikro	19	Toko, Makanan, kantin	46%
5.	Pelabuhan Bakauheni	Jl. Pelabuhan Bakaheni Lampung		1804,98	Sewa	Mikro Kecil	20 39	Toko, Makanan, kantin	69%

Kedepan, untuk mengatasi tantangan dalam implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menjalin kerjasama dengan KADIN untuk pengembangan UMKM kota Cilegon (Galeri UMKM Pulo Mrak). Selain itu, akan dilakukan penataan pedagang Lapak UMKM di lantai dasar pelabuhan sebanyak 26 Lapak dengan dana PKBL. PT. ASDP Indonesia Ferry juga akan melakukan pendampingan para calon *tenant* UMKM dengan pelatihan dan penyuluhan untuk kemajuan UMKM yang terdapat di Area Pelabuhan Merak dengan dana PKBL.

III. REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR mendukung BUMN untuk memberikan ruang promosi yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil, menengah dan mikro supaya

ekonomi *recovery Covid-19* pasca pandemi bisa terjadi.

2. Mendorong, BUMN menjadi *leader* sektor ekonomi dengan menarik berbagai pelaku ekonomi lainya termasuk UMKM.
3. Mendukung Kolaborasi antar BUMN dan UMKM yang baik di pelabuhan ASDP Merak yang telah terlihat dari Infrastruktur yang disediakan untuk UMKM. Hal ini akan membuat UMKM berkembang bersama-sama dengan pengembangan wilayah di pelabuhan Merak, dan pola ini dapat menjadi contoh untuk diterapkan di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan lainnya.
4. *Grand design* dari ASDP khususnya di Pelabuhan Merak agar menjadi satu kesatuan pengembangan UMKM di wilayah Banten dan sekitarnya, agar pada akhirnya dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI BANTEN**

TTD.

**ARIA BIMA
A. 189**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto di sebuah sudut Area UMKM



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI saat berdialog dengan pimpinan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Area Bima saat berdialog dengan UMKM di lokasi area UMKM Pelabuhan Merak.

